

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BERDASARKAN PAGU ALOKASI TA. 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		130	
	PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		32	
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi	201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan
Reguler	Provinsi	202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan
Reguler	kab/kota	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	5	Laporan
Reguler	kab/kota	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	5	Laporan
		5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi	201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
		5245.BKC	Pemantauan Lembaga		30	Laporan
		5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	30	Laporan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi	201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
Reguler	Provinsi	202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
Reguler	Provinsi	203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
Reguler	Provinsi	204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
Reguler	Provinsi	205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
Reguler	kab/kota	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
Reguler	kab/kota	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	5	Laporan
Reguler	kab/kota	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	5	Laporan
Reguler	kab/kota	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	5	Laporan
Reguler	kab/kota	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	5	Laporan
		6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU		41	
		6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		40	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan pemilu	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	5	Laporan

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		306 Fasilitas dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		307 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		308 Fasilitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Fasilitas dan pembinaan aparaturnya (Kecamatan)	Fasilitas dan pembinaan aparaturnya	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	34	Laporan
		6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Jumlah Laporan Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	34	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	3.205	Orang
		6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	Jumlah layanan pengembangan Sistem Informasi Bawaslu yang terintegrasi	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	6	Unit
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	0	Unit
		6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC		10	
		6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		10	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	Jumlah layanan pembayaran honorarium dan operasional dukungan tahapan pengawasan pemilu oleh lembaga ad-hoc	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Honorarium (Kecamatan)	Jumlah pembayaran honorarium Panwascam	34	Daerah
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501 Honorarium (Kelurahan/Desa)	Jumlah pembayaran honorarium Panwas Kelurahan/Desa	291	Orang
Tahapan Pemilu	TPS		601 Honorarium (TPS)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS	3.205	Orang
Tahapan Pemilu	Luar Negeri		701 Honorarium (Luar Negeri)	Jumlah pembayaran honorarium Panwaslu LN	0	Perwakilan
Tahapan Pemilu	Luar Negeri		801 Honorarium (TPS Luar Negeri dan Kotak Suara Keliling)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS LN dan kotak suara keliling	0	Orang
		6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	Jumlah layanan dukungan Operasional Pengawas Ad-Hoc	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	5	Lembaga
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	5	Lembaga
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	34	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		403 Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	34	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	34	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		405 Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	34	Orang
		6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU		7	
		6843.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		204 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara
		6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Kampanye	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan

Keterangan	LUKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	291	Laporan
		6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		7	
		6845.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
		6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	Jumlah kegiatan Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	291	Laporan
Tahapan Pemilu	TPS	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	3.205	Laporan
		6848	PENGAWASAN LOGISTIK		7	
		6848.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	5	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
		6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6848.QIC.001	Pengawasan Logistik	Jumlah laporan hasil Pengawasan Logistik	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa	501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	291	Laporan
Tahapan Pemilu	TPS	601	Pengawasan logistik (TPS)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	3.205	Laporan
		6844	PENGAWASAN MASA TENANG		7	

Keterangan	LUKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
		6844.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan kelentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara
		6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang	Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Tenang	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	34	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa	501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	291	Laporan
		6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU		7	
		6846.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan kelentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
		6846.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	204	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	5	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
		6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN/KOTA		12	
		6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		12	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji	Jumlah laporan publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	6	Laporan
			Komponen Input :			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan

Keterangan	LUKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
		6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	6	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		Komponen Input : 201 Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	5	Laporan
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		250	
		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL		6	
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6	Dokumen, Layanan, Laporan
		4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		6	Dokumen, Layanan, Laporan
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen
Reguler	Kabikota		301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	5	Dokumen
		4356	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI		12	
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12	Layanan, Laporan, Dokumen
		4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		6	Layanan, Laporan, Dokumen
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan
Reguler	Kabikota		301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	5	Laporan
		4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		6	Layanan, Laporan, Dokumen
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan
Reguler	Kabikota		301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	5	Laporan
		6849	PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM		31	
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7	Layanan, Laporan, Dokumen
		6849.EBA.956	Layanan BMN		6	Layanan, Laporan, Dokumen
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
Reguler	Kabikota		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	5	Laporan
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan, Laporan, Dokumen
Reguler	1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		Komponen Input : 001 Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan lunjangan ASN yang tepat waktu	1	
Reguler	1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1	
		6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket
		6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		0	Unit, M2, Paket
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 202 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		Unit
Reguler	Provinsi		203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		Unit
Reguler	Kabikota		302 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		Unit
Reguler	Kabikota		303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		Unit
		6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 201 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit
Reguler	Kabikota		301 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		24	Dokumen, Layanan, Laporan
		6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		6	Dokumen, Layanan, Laporan
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
Reguler	Kabikota		301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	5	Dokumen
		6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		6	Dokumen, Layanan, Laporan
Reguler	Provinsi		Komponen Input : 201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen

Keterangan	LUKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan	
Reguler	Kabikota		301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	5	Dokumen	
		6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		6	Dokumen, Layanan, Laporan	
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	
Reguler	Kabikota		301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	5	Dokumen	
		6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		6	Dokumen, Layanan, Laporan	
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	
Reguler	Kabikota		301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	5	Dokumen	
		6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM		201		
		6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		18	Layanan, Laporan, Dokumen	
		6850.EBA.957	Layanan Hukum		6	Layanan, Laporan, Dokumen	
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	
Reguler	Provinsi		202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	
Reguler	Provinsi		203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	
Reguler	Kabikota		301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	5	Laporan	
Reguler	Kabikota		302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	5	Laporan	
		6850.EBA.962	Layanan Umum		6	Layanan, Laporan, Dokumen	
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan	
Reguler	Kabikota		301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	5	Laporan	
		6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		6	Layanan, Laporan, Dokumen	
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilhan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	
Reguler	Provinsi		202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	
Reguler	Kabikota		301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilhan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	5	Laporan	
		6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		183	Orang, Layanan	
		6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		183	Orang, Layanan	
			Komponen Input :				
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	53	Orang	
Reguler	Kabikota		301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	130	Orang	
TOTAL							

